

## Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia

Habib Muhammad Shahib<sup>\*1</sup>, Muhammad Ridwan Hasanuddin<sup>2</sup>, Yasmi Nurdin<sup>3</sup>, Siprianus Palete<sup>4</sup>, Fenny Mika<sup>5</sup>, Reski Rahayu Saputri<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar

**Abstract.** This study tries to analyze the accountability and transparency of local government budgets throughout Indonesia, during the Covid-19 period, through their official website. This research then used an indicator-based content analysis that has been commonly used to measure accountability and transparency practices through local government websites while still adapting them to the local Indonesian context. This study shows the low level of accountability and transparency of local government budgets, especially about the re-focusing budget for the COVID-19 response. It is suspected that this result is caused by (1) weak public pressure on the government, (2) the absence of standards that have law consequences governing the pattern of local government accountability on their official websites, (3) the uneven social-education-technology order of Indonesian society, especially in the regions of central and eastern Indonesia which are far behind. Therefore, there is no good community structure that can optimally oversee government accountability and transparency in all regions in Indonesia. Finally, this study suggests that the provincial government to district/city governments should pay more attention to accountability and transparency related to the budget as a form of government accountability by inviting the public to oversee these activities actively. This research is then expected to fill the discussion of accountability and transparency issues in the current government study literature.

**Keywords:** Accountability; Transparency; Budget; Covid-19; Government; Local; Indonesia.

**Abstrak.** Studi ini mencoba menghadirkan suatu analisis dalam menilai akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, pada masa Covid-19, melalui *website* resmi mereka. Penelitian ini kemudian menggunakan analisis konten berbasis indikator yang telah umum digunakan untuk mengukur praktik akuntabilitas dan transparansi melalui *website* pemerintah daerah dengan tetap menyesuaikannya dengan konteks lokal Indonesia. Hasil studi ini kemudian menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan *re-focusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Diduga hasil ini diakibatkan oleh (1) lemahnya daya tekan publik kepada pemerintah, (2) tidak adanya standar yang berkonsekuensi hukum yang mengatur pola akuntabilitas pemerintah daerah di *website* resmi mereka, (3) tatanan sosial-pendidikan-teknologi masyarakat Indonesia yang belum merata, khususnya di wilayah Indonesia tengah dan timur yang jauh tertinggal. Sehingga belum hadir tatanan masyarakat yang mampu mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintah secara optimal di seluruh daerah di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota lebih memperhatikan akuntabilitas dan transparansi terkait anggaran sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dengan mengajak publik untuk turut serta berpartisipasi aktif mengawal aktivitas tersebut. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat mengisi diskusi isu-isu akuntabilitas dan transparansi dalam literatur kajian pemerintahan terkini.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Anggaran; Covid-19; Pemerintah; Daerah; Indonesia.

Received: 22 Oktober 2021

Revised: 8 Februari 2022

Accepted: 6 Maret 2022

### \*Korespondensi:

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar  
Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No.101, Karampuang, Kec.  
Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231  
Email: muh.shahib@unifa.ac.id

## PENDAHULUAN

**D**ata statistik menunjukkan kasus Covid 19 di Indonesia, sejak bermula di awal tahun 2020, telah menembus 5 juta kasus dan telah memakan korban jiwa sebanyak 140 ribu jiwa (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022). Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, berbagai sektor ekonomi kemudian menyesuaikan hingga menghentikan proses operasinya. Beberapa contohnya, perusahaan menghentikan proses produksi, membatasi jumlah karyawan aktif, hingga dibatasinya jam operasional pusat perbelanjaan. Hal tersebut memicu perekonomian daerah hingga berbagai negara di dunia mengalami guncangan akibat terganggunya proses produksi hingga penjualan barang dan jasa (Rusiadi, Aprilia, Adianri, & Verawati, 2020).

Melemahnya pertumbuhan perekonomian dunia di era Covid-19 sangat mempengaruhi daya produksi dan beli masyarakat. Khususnya, masyarakat menengah kebawah yang cukup terdampak berat akibat pandemi ini. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah untuk menghadirkan beberapa kebijakan dalam menanggulangi dampak perekonomian yang cukup berat dirasakan masyarakat. Beberapa hal tersebut antara lain: memberi bantuan sosial (BANSOS) tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan untuk usaha mikro kecil, dll (CNBC, 2021). Tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan bansos tersebut. Apalagi, ketika mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap karena dugaan korupsi BANSOS (Iqbal, 2021). Hal ini menyebabkan hadirnya tanda tanya besar dari masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini (Cahya, Tarigan, & Rivaldo, 2021; CNN-Indonesia, 2021).

Selain itu, sejak pemerintah menetapkan peraturan mengenai penyesuaian anggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan menyediakan regulasi terkait penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Banyak daerah yang mengalami perlambatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik (Masinambow & Gosal, 2021; Sugihamretha, 2020; Tarigan, Sinaga, & Rachmawati, 2020). Hal yang juga semakin membuat publik bertanya-tanya, bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, dari pusat hingga

daerah. Apalagi dalam kondisi Covid-19, ruang-ruang terbuka publik cenderung dibatasi untuk menekan penyebaran virus (Saputra, 2021). Hal yang kemudian menyebabkan akses terhadap informasi publik tidak sebebas seperti sebelum pandemi.

Isu akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pemerintah di era Covid-19 kemudian menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh. Khususnya, jika hal tersebut dikaitkan dengan begitu melekatnya wacana akuntabilitas dan transparansi dalam kajian-kajian administrasi, manajemen, hingga politik pemerintah (Ahn & Bretschneider, 2011; da Cruz, Tavares, Marques, Jorge, & de Sousa, 2016; Jurnal & Siti-Nabiha, 2015; Navarro Galera, De Los Ríos Berjillos, Ruiz Lozano, & Tirado Valencia, 2014; Pina, Torres, & Royo, 2010; Shahib, 2021; Shahib, Sukoharsono, Achsin, & Prihatiningtias, 2020b).

Umumnya, banyak ahli yang memandang bahwa secara filosofis akuntabilitas itu merujuk pada tiga poin utama yakni 1) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”, 2) “kewajiban atau keinginan untuk menerima pertanggungjawaban”, dan 3) “mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Deegan, 2017; Ezzamel, 1997; Ramanna, 2013; Shahib, 2021). Ketiga hal ini lebih jauh dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari *social legitimacy* pemerintah terhadap publik yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan, pemerintah adalah institusi yang berasal dari rakyat, menggunakan uang rakyat, dan bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Maka secara otomatis, pemerintah kemudian dituntut oleh rakyat untuk akuntabel dalam setiap aktivitasnya (Alcaraz-Quiles, Navarro-Galera, & Ortiz-Rodríguez, 2015; Fukuyama, 2014; Lanis & Richardson, 2013).

Sedangkan transparansi adalah salah satu unsur penting dari akuntabilitas pemerintah, khususnya mewakili poin “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”. Terutama, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengetahui proses, fakta, dan nilai (angka) yang dihasilkan dari suatu aktivitas pemerintah. Dalam praktiknya, transparansi sering diwakili oleh kemudahan akses dan ketersediaan informasi dari berbagai aktivitas pemerintah kepada publik. Umumnya, contoh nyata praktik transparansi adalah tersedianya laporan aktivitas pemerintah (seperti: Laporan Keuangan, Kinerja, Anggaran, dll) (Gallhofer, Haslam, & Yonekura, 2015;

ICMA, 2021; Navarro Galera et al., 2014; Pina et al., 2010; Whyte & Wiegatz, 2016). Hal ini pada akhirnya diharapkan akan menghadirkan jaminan kepada publik bahwa pemerintah telah dikelola secara efisien dan bebas dari korupsi (ICMA, 2021; Transparency International, 2015).

Selanjutnya, ada hal yang menarik jika melihat kajian-kajian akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah dalam satu dekade terakhir. Kajian-kajian tersebut cenderung berfokus kepada transformasi pemerintah di berbagai belahan dunia untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, seperti dengan menggunakan website resmi atau aplikasi resmi pemerintah (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014).

Berangkat dari kajian akuntabilitas dan transparansi terdahulu, khususnya fenomena digitalisasi praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pemerintah dalam satu dekade belakangan ini. Fenomena akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid 19 ini menemukan momentum yang tepat untuk dikaji sebagai salah satu bentuk kebaruan dalam kajian akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah yang bergerak ke arah *full-digital*.

Hal ini dikarenakan, pertama, terjadi gejala turunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di era Covid-19 akibat kasus korupsi Bansos yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial (Iqbal, 2021). Kedua, melambatnya pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai daerah dengan menggunakan alasan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 juga membuat publik mempertanyakan ketepatan-sasaran dari aktivitas *refocusing* anggaran tersebut (Cahya et al., 2021; Indonesia corruption watch, 2020; Syaipudin, 2020). Ketiga, pembatasan aktivitas fisik untuk menekan laju penyebaran Covid-19 menyebabkan akses terhadap informasi publik tidak sebebaskan seperti sebelum pandemi (Saputra, 2021). Maka tentu, pilihan digitalisasi praktik akuntabilitas dan transparansi adalah yang paling relevan untuk dipilih oleh pemerintah dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah (Cahya et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini kemudian berfokus untuk meneliti bagaimana

akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, di era covid-19 ini, pada website pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia?

Selain dari yang telah diutarakan sebelumnya, terdapat alasan lain mengapa memilih fokus penelitian pada isu akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah se-Indonesia melalui website Pemda. Pertama, aktivitas Pemda di seluruh Indonesia menarik dikaji dikarenakan dalam rentang satu dekade terakhir Pemda se-Indonesia juga turut mengalami transformasi aktivitas akuntabilitas dan transparansi ke arah digital. Hal ini ditandai dengan semakin informatifnya website resmi Pemda se-Indonesia (Shahib & Risky, 2017; Shahib, Sukoharsono, Achsin, & Prihatiningtias, 2020a). Namun demikian, aktivitas akuntabilitas Pemda di website resmi-nya masih bersifat sukarela karena belum diatur oleh aturan terkait (Shahib & Risky, 2017; Shahib et al., 2020a). Hal ini kemudian memungkinkan perbedaan pola akuntabilitas website dari tiap Pemda.

Kedua, dalam satu dekade terakhir ini juga, jumlah Pemda se-Indonesia yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai salah satu indikator tertib administrasi keuangan, dari BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia) terus meningkat, bahkan hingga mencapai persentase 80-90 persen dari total seluruh Pemda di Indonesia (BPK-RI, 2021). Hal ini tentu menarik dikaji linearitasnya dengan bagaimana pola akuntabilitas dan transparansi yang digambarkan dalam website Pemda se-indonesia.

Ketiga, di era pandemi kali ini, pola pemberitaan yang timpang akibat terpusatnya media massa di wilayah Indonesia barat (khususnya, Jakarta), membuat pengawasan atas aktivitas pemerintah yang dilakukan media massa cenderung hanya berfokus di wilayah Indonesia barat. Maka penelitian ini diharapkan dapat meneropong Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (R. William Liddle, 2013), dengan lebih adil dan menyeluruh.

Penelitian ini pada akhirnya memberikan beberapa kontribusi. Pertama, dalam mengembangkan kajian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah. Khususnya dalam konteks akuntabilitas dan transparansi keuangan berbasis website pada Pemda di Indonesia. Kedua, penelitian ini memberikan masukan kebijakan kepada Pemda dalam mengembangkan pola akuntabilitas dan transparansi keuangan

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi website secara lebih efektif. Ketiga, tentu penelitian ini akan mengisi diskusi isu-isu akuntabilitas dan akuntansi dalam literatur kajian pemerintahan terkini.

Artikel penelitian ini kemudian akan dibahas secara terstruktur. Pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, dan terakhir, kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, pada website Pemda se-Indonesia di era Covid 19 ini, penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis analisis konten. Metode analisis konten merupakan metode yang umumnya digunakan secara luas untuk menilai kuantitas dan kualitas informasi yang disiarkan/diterbitkan oleh entitas privat dan publik melalui berbagai media (cetak, online, dan gambar bergerak) (Creswell, 2013; Jose, Lee, & Lee, 2017; Krank, Wallbaum, & Grêt-Regamey, 2010; Mir, Chatterjee, & Taplin, 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; Shahib et al., 2020a). Umumnya, penggunaan analisis konten akan berujung pada penggunaan standar/acuan “ada” atau “tidak ada”-nya suatu informasi di media yang dimiliki entitas. Hal ini kemudian akan berujung pada pemberian nilai 1 untuk informasi yang tersedia dan 0 untuk informasi yang tidak tersedia berdasarkan acuan tertentu (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro, Ríos, Ruiz, & Tirado, 2014).

Hal ini kemudian menjadikan acuan penilaian untuk analisis konten menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, mengikuti saran-saran penelitian terdahulu, salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas acuan/standar penilaian dalam penelitian yang menggunakan analisis konten adalah dengan melakukan replikasi dan penyesuaian standar/acuan dari penelitian terdahulu yang telah luas digunakan (Creswell, 2013; Jose et al., 2017; Krank et al., 2010; Mir et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014; Parker, 2009; Saldaña, 2013; Shahib et al., 2020a). Penelitian ini kemudian melakukan penyesuaian dari standar/acuan analisis konten untuk menilai akuntabilitas Pemda yang telah digunakan oleh Navarro Galera et al., (2014).

Ada tiga alasan utama mengapa acuan analisis konten Navarro Galera et al., (2014) dipilih. Pertama, acuan analisis konten yang digunakan oleh Navarro Galera et al., (2014) adalah acuan berbasis model GRI (Global Reporting Intitiative), suatu lembaga internasional yang konsen membantu entitas publik dan swasta atas isu-isu akuntabilitas dalam bentuk laporan (GRI, 2010). Panduan GRI ini telah luas digunakan dan diakui secara internasional sebagai acuan valid untuk mengukur publikasi informasi entitas publik (GRI, 2010, 2016; Hossain, Nik Ahmad, & Siraj, 2016; Joseph et al., 2016; Niemann & Hoppe, 2018). Kedua, acuan yang digunakan Navarro Galera et al., (2014) juga menyesuaikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh badan-badan akuntansi dunia seperti *Audit Commission*, *Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA), dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang membuat acuan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, akuntabilitas secara keseluruhan dan transparansi keuangan sebagai konsekuensi penjelasan “situasi atau kualitas pertanggungjawaban” dari akuntabilitas keuangan pemerintah (Navarro et al., 2014). Ketiga, studi Navarro Galera et al., (2014) telah dirujuk oleh banyak peneliti dari seluruh dunia. Scopus (2022) mencatat terdapat 62 artikel yang merujuk penelitian ini dan Google-Scholar (2022) mencatat 108 artikel dan buku yang telah merujuk penelitian ini.

Akhirnya, setelah melakukan penyesuaian dengan konteks Pemda di Indonesia, berikut acuan indikator analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19**

No.	INDIKATOR
1	Apakah terdapat profil <i>website</i> pemerintahan?
2	Apakah layanan publik telah dipublikasikan?
3	Apakah kinerja pemda telah digambarkan secara efektif dan efisien pada <i>website</i> pemda?
4	Apakah informasi program Pemerintah telah disajikan pada <i>website</i> ?
5	Apakah APBD tahun 2020 diungkapkan pada <i>website</i> Pemda?
6	Apakah realokasi anggaran Covid-19 pada tahun 2020 diungkapkan pada <i>website</i> Pemda?
7	Apakah Alokasi modal telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan di <i>website</i> Pemda?
8	Apakah laporan tentang kebijakan akuntabilitas yang dipublikasikan dihadirkan pada <i>website</i> Pemda?
9	Apakah laporan tentang perkiraan pengeluaran dipublikasikan di <i>website</i> Pemda?

10	Apakah pengeluaran bruto telah dipublikasikan secara rinci menurut klasifikasi keuangan di <i>website</i> Pemda?
11	Apakah terjadi kesulitan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran Pemda di <i>website</i> Pemda?
12	Apakah mudah dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran di <i>Website</i> Pemda?
13	Apakah anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat di <i>website</i> Pemda?
14	Apakah penyajian anggaran telah menyertakan periode sebelumnya di <i>website</i> Pemda?
15	Apakah tampilan dalam mengevaluasi anggaran hanya membandingkan dengan realisasi sesungguhnya?
16	Apakah proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus?
17	Apakah laporan pertanggung jawaban anggaran tahunan dipublikasikan tepat waktu?

Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia

**Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran**

NO.	INDIKATOR
1	Ketersediaan Laporan Keuangan dengan Lengkap
2	Ketersediaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
4	Ketersediaan Laporan Operasional (LO)
5	Ketersediaan Laporan Arus Kas
6	Ketersediaan Laporan Perubahan Modal
7	Ketersediaan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8	Ketersediaan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Sumber: Navarro Galera et al., (2014) disesuaikan dengan konteks Pemda di Indonesia

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disaksikan bahwa sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencoba melihat praktik akuntabilitas anggaran di *website* Pemda se-Indonesia secara holistik yang mampu mewakili tiga dimensi praktik akuntabilitas yaitu (1) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban”, (2) “kewajiban atau keinginan untuk menerima pertanggungjawaban”, dan (3) “mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Deegan, 2017; Ezzamel, 1997; Ramanna, 2013; Shahib, 2021). Sedangkan tabel 2, tabel ini menunjukkan acuan utama aktivitas transparansi anggaran pemerintah yang berbasis pada kemudahan akses dan ketersediaan informasi atas keterkaitan siklus anggaran dan pelaporan keuangan yang dapat dilihat dan dipahami jika seluruh unsur laporan keuangan Pemda berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersedia (ICMA, 2021).



Selanjutnya dalam menerapkan metode konten analisis berbasis acuan dari tabel 1 dan 2 di atas, Penelitian ini berfokus kepada seluruh website Pemda (34) Provinsi dan Kabupaten/Kota (514) Se-Indonesia. Jika informasi berbasis acuan tersebut tersedia atau diungkapkan via website Pemda maka tiap Pemda diberikan nilai 1 dan 0 jika sebaliknya. Hal ini kemudian menghasilkan indikator numerik dari jumlah informasi yang dikeluarkan di setiap website Pemda. Tidak lupa, analisis dengan lebih fokus dilakukan untuk menghindari subjektivitas (Joseph, Pilcher, & Taplin, 2014). Kemudian, skor total untuk Pemda diperoleh sebagai jumlah aritmatika dari nilai yang diperoleh untuk setiap item indikator acuan.

Dalam pengambilan data, penelitian ini fokus mengambil data dalam rentang bulan September – November 2021. Periode ini dipilih karena dianggap paling menggambarkan situasi *re-focusing* anggaran yang dialami semua pemda di Indonesia sejak awal tahun 2020 yang akan tergambar dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang diperiksa oleh BPK-RI pada awal tahun 2021 (Januari-Mei). Selain itu, rentang waktu ini dipilih berdasarkan asumsi tampilan informasi keuangan di website Pemda dalam periode ini tidak akan mengalami perubahan karena telah melewati masa audit laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2020 (Januari-Mei) dan tidak berada pada fase finalisasi penyusunan laporan keuangan (UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Metode penelitian ini kemudian menjadikan studi ini memiliki dua level analisis. Pertama, analisis deskriptif dari hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkatan informasi yang diungkapkan oleh Pemda se-Indonesia. Kedua, analisis lanjutan untuk melihat bagaimana hubungan hasil penelitian ini dengan diskusi isu-isu akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam literatur kajian pemerintahan terkini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Provinsi se-Indonesia**

Sebagaimana yang dapat disaksikan dalam Tabel 3 di bawah ini, pola akuntabilitas dan transparansi anggaran Covid-19 Pemda Provinsi (Pemprov) se-Indonesia menunjukkan tren yang cenderung seragam. Bahkan jika mengikuti

pembagian zona waktu, terlihat wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia tidak memiliki perbedaan yang jauh mencolok satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya Pemprov di tiap zona waktu yang nilai akuntabilitas websitenya berada dibawah nilai 9 sebagai nilai tengah dari total skor acuan akuntabilitas website penelitian ini.

**Tabel 3. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia**

Provinsi	Akuntabilitas																	Total	Provinsi	Tranparansi								Total														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			1	2	3	4	5	6	7	8															
Aceh	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sumatera Utara	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sumatera Barat	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Sumatera Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Sumatera Selatan	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Riau	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kepulauan Riau	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kep. Bangka Belitung	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bengkulu	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jambi	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Jambi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Lampung	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Banten	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DKI Jakarta	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	DKI Jakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Jawa Barat	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jawa Tengah	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Jawa Timur	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D.I Yogyakarta	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	D.I Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Kalimantan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kalimantan Timur	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kalimantan Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kalimantan Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Sulawesi Selatan	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sulawesi Tengah	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sulawesi Utara	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gorontalo	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Bali	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
NTB	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NTT	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	NTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maluku Utara	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maluku	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	Maluku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
Papua Barat	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Papua	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sumber: data diolah (2021) berbasis pada tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19 & Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran

Hal menarik lainnya, ternyata hanya tiga Pemprov, yakni Kalimantan Utara, Barat, dan Sulawesi Tenggara yang mempublikasikan “informasi realokasi anggaran covid pada tahun 2020” (indikator nomor 6. Akuntabilitas) pada website Pemda dalam rentang pengamatan penelitian ini (September – November 2021). Namun, ketiga Pemprov ini tercatat tidak sama transparannya dalam menyediakan akses ke laporan keuangannya. Tercatat, hanya Pemprov Kalimantan barat yang praktik akuntabilitas realokasi anggaran Covid-19-nya selaras dengan transparansi laporan keuangannya sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3 di atas.

## Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia

Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan alamat dan menganalisis website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, ditemukan fakta yang menarik dari total 514 Kabupaten/Kota, ternyata hanya 407 (79%) Pemda Kabupaten/Kota yang websitenya dapat diakses dan memiliki informasi yang dibutuhkan penelitian ini. Mengingat banyaknya jumlah website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia, studi ini kemudian mengelompokkan hasil analisis konten website Pemda Kabupaten/Kota dengan melakukan akumulasi berbasis indikator akuntabilitas dan transparansi anggaran Covid-19 yang digunakan penelitian ini, sekaligus mengikuti format pembagian zona waktu Indonesia, timur, tengah, dan barat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 pada Pemda Kab/Kota Se-Indonesia**

Wilayah	Akuntabilitas																	Wilayah	Transparansi							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		1	2	3	4	5	6	7	8
INDONESIA TIMUR	168	141	150	157	44	6	39	41	44	39	17	40	41	58	36	29	34	INDONESIA TIMUR	2	15	3	3	2	2	1	4
INDONESIA TENGAH	28	27	28	27	14	1	3	13	5	3	21	9	6	9	5	3	7	INDONESIA TENGAH	3	3	3	2	3	2	2	3
INDONESIA BARAT	228	200	207	208	84	38	47	72	62	39	100	119	67	74	50	63	67	INDONESIA BARAT	33	45	37	26	21	20	19	25

Sumber: data diolah (2021) berbasis pada tabel 1. Indikator Akuntabilitas Anggaran Covid-19 & Tabel 2. Indikator Transparansi Pelaporan Anggaran

Berdasarkan data Tabel 4 tersebut, terlihat jelas bahwa pola informasi akuntabilitas website Pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia sudah semakin ramai dan semarak. Namun, terdapat catatan penting yang juga selaras dengan temuan di Tabel 3 sebelumnya, bahwa informasi akuntabilitas realokasi anggaran covid 19 pada tahun 2020 (indikator no.6) cenderung tidak menjadi prioritas Pemda untuk mempublikasikannya ke masyarakat luas. Hal yang juga tergambar dengan rendahnya skor transparansi informasi pelaporan anggaran yang ditunjukkan oleh tabel 4. Selain itu, hal menarik lainnya adalah studi ini menemukan rendahnya skor dari Pemda Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia tengah dan timur dari segi akuntabilitas (fokus poin 6-17) dan transparansi anggaran Pemerintah. Hal ini kemudian menarik untuk didiskusikan lebih jauh.

## Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Covid-19 di Website Pemda: Daya Legitimasi sosial, NPM, dan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi

Menarik kemudian untuk mendiskusikan hasil penelitian di atas dari berbagai perspektif. Terutama mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan kajian-kajian pola akuntabilitas pemerintah. Setidaknya ada tiga sudut pandang teoritis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.

Pertama, sudut pandang praktik akuntabilitas pemerintah adalah simbol legitimasi sosial tatanan masyarakat. Sudut pandang ini berdasar pada teori legitimasi yang mengasumsikan bahwa semua organisasi, termasuk juga organisasi pemerintah, senantiasa mencoba untuk berperilaku etis sesuai standar etika masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi agar mereka dapat menjaga eksistensi dan legitimasi sosialnya di tengah masyarakat (Hahn & Kühnen, 2013; Qian, Burritt, & Monroe, 2011; Shahib & Risky, 2017). Menyediakan laporan akuntabilitas dalam berbagai bentuknya kemudian dipercaya banyak peneliti sebagai cara yang jitu untuk mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas baik organisasi untuk menjaga legitimasi sosialnya (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib, 2021; Shahib & Risky, 2017). Terlebih, jika terdapat dorongan/tekanan publik agar organisasi mempertanggungjawabkan suatu isu. Maka umumnya, organisasi akan menggunakan instrumen laporan akuntabilitasnya untuk lebih fokus menjelaskan hal tersebut c. Hal ini dikarenakan dalam logika akuntabilitas, laporan adalah resume akhir yang dapat menggambarkan tiga dimensi utama akuntabilitas yaitu (1) “situasi atau kualitas pertanggungjawaban dari suatu entitas”, (2) “kewajiban atau keinginan entitas untuk menerima pertanggungjawaban”, dan (3) “bagaimana entitas mempertanggungjawabkan sesuatu hal” (Shahib, 2021).

Dengan logika teori legitimasi sosial ini, temuan penelitian ini kemudian seolah menunjukkan bahwa keresahan dan pertanyaan-pertanyaan kritis publik atas pengelolaan dan *refocusing* anggaran Pemda untuk penanggulangan Covid-19 (Cahya et al., 2021; CNN-Indonesia, 2021; Indonesia corruption watch, 2020; Junaidi, Sukarna, Arifin, & Soegianto, 2020; Tarigan et al., 2020) belum dianggap sebagai fenomena yang harus ditanggapi dengan serius oleh mayoritas Pemda di Indonesia meskipun sarana website tersedia untuk itu. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dibaca sebagai

tanda bahwa pandangan kritis masyarakat atas isu anggaran Covid-19 belum memiliki daya tekan yang kuat sehingga belum dapat memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan atas isu tersebut (Hahn & Kühnen, 2013; Qian et al., 2011; Shahib & Risky, 2017). Terlebih dalam konteks saat ini, meskipun telah ada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sayangnya belum ada instrumen hukum turunannya yang mewajibkan dan mengatur secara jelas praktik akuntabilitas Pemda di website resmi mereka.

Selanjutnya, sudut pandang kedua yang juga memiliki kemungkinan mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di seluruh Indonesia adalah dominannya paradigma *New Public Management* (NPM) dalam tata kelola Pemda saat ini (Bell, Hoque, Harun, Van Peurseem, & Eggleton, 2012; Shahib, 2021). Paradigma NPM ini percaya bahwa gaya tata kelola dan kinerja manajemen pemerintah akan lebih baik jika mengikuti cara pandang linear, mekanis, ekonomis (berbasis pasar), dan efisien-efektif sebagaimana perusahaan berorientasi profit bekerja (Bell et al., 2012; Diefenbach, 2009; Harun & Robinson, 2010; Shahib, 2021).

Jejak paradigma NPM ini dapat ditelusuri sejak tahun 80-90an dipopulerkan oleh negara-negara maju dunia seperti Amerika, Kanada, dan Inggris (Diefenbach, 2009; Goldfinch & Wallis, 2010; Lapsley, 2009; Lorenz, 2012; Perez-Lopez, Prior, & Zafra-Gómez, 2015) dan penyebarannya didukung oleh lembaga *think-tank* terkemuka dunia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) (de Vries & Nemeč, 2013; Harun, An, & Kahar, 2013; Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017). Krisis ekonomi-politik di tahun 1998 kemudian menjadi momentum bagi lembaga-lembaga dunia, seperti Bank dunia dan IMF, untuk mendorong pemerintah Indonesia mengadopsi paradigma NPM ini dalam tata kelola pemerintahnya dari pusat hingga ke seluruh daerah. Bahkan, dorongan ini terlihat seperti paksaan, dikarenakan hal ini menjadi syarat bantuan utang IMF ke pemerintah Indonesia, termasuk juga kepada negara-negara lain yang membutuhkan bantuan keuangan di masa itu (Bell et al., 2012; Hadi et al., 2012; Harun & Robinson, 2010).

Paradigma NPM kemudian perlahan terinstitusionalisasi mulai dari peraturan hingga ke praktik kerja pemerintah. Sebut saja, praktik seperti penilaian kinerja

berbasis aturan, pengendalian biaya, orientasi kinerja yang efisien dan efektif, dan kerja yang berorientasi laporan audit semakin menguat (Shahib, 2021). Disadari atau tidak, kondisi ini kemudian membuat pemerintah, pusat dan daerah, perlahan bertransformasi layaknya perusahaan yang berorientasi pasar dan profit. Pemerintah akan cenderung fokus kepada orientasi efisien-efektif kerja berbasis indikator keuangan dan pertumbuhan ekonomi semata, serta cenderung menafikan hal-hal non-keuangan lainnya, seperti isu sosial, budaya dan lingkungan (Diefenbach, 2009; Djahhuri, 2009; Lapsley, 2009; Rajjani, 2011; Shahib, 2021).

Berdasarkan pemaparan atas pengaruh kuat NPM dalam gaya tata kelola pemerintah tersebut, faktor kuatnya orientasi efisien-efektif kerja berbasis aturan dan indikator keuangan dari gaya NPM memiliki kemungkinan menjadi pertimbangan utama Pemda untuk belum berfokus dalam praktik akuntabilitas dan transparansi anggaran covid-19 di website mereka. Hal ini disebabkan karena kewajiban utama yang diatur dan menjadi simbol akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemda adalah terlaksananya pelaporan keuangan Pemda berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang laporannya wajib diaudit oleh BPK-RI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan UU No. 15/2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sehingga, selama Pemda sudah menjalankan peraturan tersebut dan ini jelas tergambar dari jumlah Pemda se-Indonesia yang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI yang telah mencapai persentase 80-90 persen dari total seluruh Pemda di Indonesia untuk tahun laporan keuangan 2021 (BPK-RI, 2021). Pemda kemudian akan menganggap bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Meskipun, terdapat begitu besar dorongan publik agar Pemda lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19 dengan memanfaatkan semua sumber dayanya.

Terakhir, sudut pandang ketiga yang memiliki kemungkinan besar mempengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi berbasis website dari Pemda di seluruh Indonesia adalah tatanan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi masyarakat Indonesia yang belum merata (CNN Indonesia, 2019). Dalam kajian

akuntabilitas berbasis internet, ketersediaan infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi yang membuat masyarakat melek internet adalah hal yang diduga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pola akuntabilitas pemerintah di internet (Alcaraz-Quiles et al., 2015).

Hal ini berdiri di atas asumsi bahwa dunia internet adalah dunia paralel (Shahib et al., 2020a). Maksudnya, pemerintah cenderung akan melakukan segala upaya untuk lebih akuntabel di dunia internet jika masyarakatnya juga sudah sangat aktif di dunia internet (Shahib et al., 2020a). Contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana gerakan aktivisme sosial-lingkungan di negara-negara maju menggunakan media sosial, seperti *twitter* dan *facebook* untuk menjalankan protesnya terhadap pemerintah dan pemerintah pun meresponsnya dengan melakukan *counter-discourse* melalui website dan akun-akun media sosial resmi mereka (Eltantawy & Wiest, 2011; Lee, So, & Leung, 2015; Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, & Pearce, 2011). Bahkan hingga menggunakan pasukan *Buzzer* (pendengung) untuk melawan narasi gerakan aktivisme tersebut (Bell et al., 2012; Shahib, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pemda-Pemda di wilayah Indonesia barat lebih akuntabel dan transparan di websitenya. Hal ini tentu menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi infrastruktur sosial-pendidikan-teknologi di Indonesia belum merata. Sehingga, belum tercipta dunia yang paralel yang membuat Pemda dipaksa untuk lebih akuntabel dan transparan di dunia maya khususnya untuk wilayah Indonesia tengah dan timur. Hal ini juga sangat sesuai dengan data yang menunjukkan meskipun Indonesia tercatat memiliki 202,35 juta pengguna internet dan termasuk dari lima besar negara pengguna internet terbesar di dunia. Namun sebarannya, masih terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa yang mencapai 55-60% total pengguna internet di Indonesia (Kurnia & Astuti, 2017; Situmorang, 2012). Hal ini juga kemudian dapat menjelaskan mengapa isu pemerintah pusat dan DKI Jakarta yang lebih banyak menjadi sorotan pengguna internet di Indonesia, khususnya melalui platform media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, dan *instagram* (Juliadi, 2017; Shahib et al., 2020a).

## Menatap Pola Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemda berbasis website Setelah Covid-19.

Setelah pembahasan dari berbagai perspektif atas hasil studi ini, penting kemudian mendiskusikan akan ke mana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran pemda yang berbasis *website* setelah pandemi Covid-19. Setidaknya ada tiga poin penting yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini.

Poin pertama, dengan semakin banyak dan tersebarnya pengguna internet di Indonesia yang turut memaralelkan ruang publik di kehidupan nyata dan maya (Kurnia & Astuti, 2017; Situmorang, 2012). Publik membutuhkan pola tekanan publik yang berbeda dan lebih sesuai zaman untuk mendorong Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan dalam isu pengelolaan anggarannya. Hal ini tentu membutuhkan komunikasi yang intens, baik secara *offline* maupun *online*, dari kelompok-kelompok sipil untuk mencari dan membangun pola baru tersebut. Tidak lupa, bangunan pola atau metode ini wajib mempertimbangkan konteks sosial-masyarakat yang unik dari masing-masing wilayah di Indonesia (Shahib, 2021; Shahib et al., 2020a).

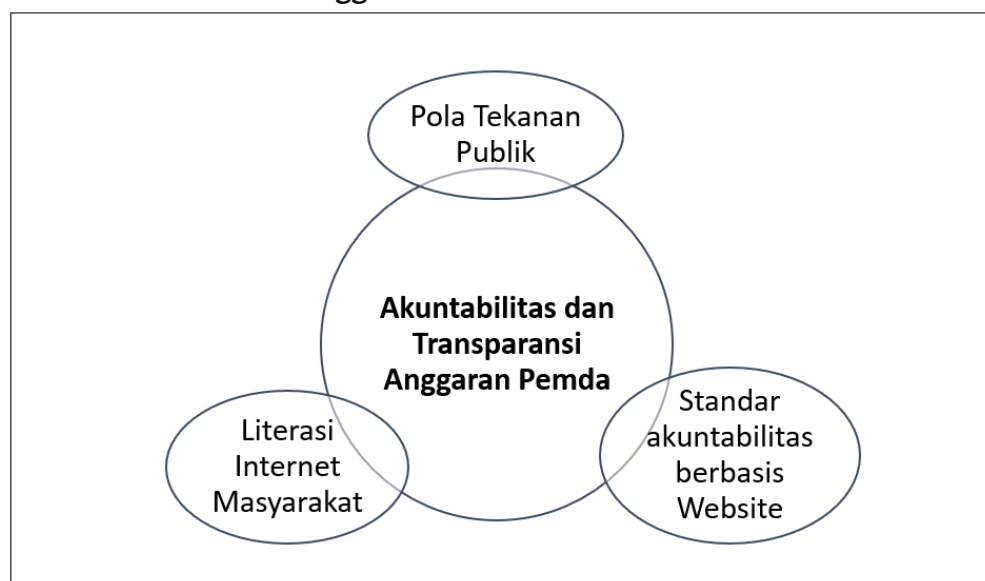
Tentu, pola atau metode tekanan publik yang efektif untuk menekan pemerintah hanya akan dapat didapatkan oleh publik jika tingkat literasi penggunaan internet publik, dalam mengawal isu pemerintahan dan sosial, juga meningkat kualitasnya (Kurnia & Astuti, 2017; Kurniawan & Rye, 2014; Shahib et al., 2020a). Hal ini kemudian menjadikan tingkat kualitas literasi internet masyarakat menempati poin kedua sebagai hal yang akan sangat mempengaruhi pola akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemda di masa depan. Maka, peningkatan kualitas literasi internet masyarakat menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali pemerintah, sebab pemerintahan yang baik hanya dapat hadir dari masyarakat yang memiliki kemampuan mengawal jalannya pemerintahan dengan baik (Fukuyama, 2014).

Terakhir, penelitian ini menemukan poin penting untuk memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakatnya adalah dengan menghadirkan standar akuntabilitas berbasis *website*. Hal ini dikarenakan pola NPM yang menekankan aktivitas pemerintah harus berbasis standar yang jelas dan



mempertimbangkan efektif dan efisiennya suatu program sudah begitu mengakar dalam tata kelola pemerintah hari ini (Shahib, 2021). Kehadiran standar ini tentu wajib melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah dalam penyusunannya. Khususnya, melibatkan perwakilan masyarakat sipil dari daerah-daerah. Sehingga pada akhirnya, standarisasi ini tetap mengakomodir pandangan berbasis konteks sosial-masyarakat daerah-daerah di Indonesia (Shahib et al., 2020b) yang akan memperkuat pengawalan penerapan standar akuntabilitas berbasis internet ini sebagaimana yang jamak terjadi di belahan dunia maju lainnya (Niemann & Hoppe, 2018). Akhirnya, bagaimana pola akuntabilitas dan transparansi anggaran Pemda di era internet akan sangat tergantung pada tiga poin utama yang telah dijelaskan sebelumnya dan tergambar dengan jelas dalam gambar berikut ini.

**Gambar 1. Masa depan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemda di era Internet**



*Sumber: data diolah berbasis hasil penelitian ini.*

## KESIMPULAN

Setelah mengkaji fenomena akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, di era covid-19 ini, pada website Pemda se-Indonesia, studi ini kemudian menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, era internet dan digital ini semakin memperkuat infrastruktur digital di masyarakat. Di satu sisi, Pemda semakin mencoba untuk lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakat dengan

menghadirkan *website* resmi mereka. Sayangnya, informasi yang ditampilkan belum terlihat menjawab tuntutan publik yang ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Hal yang kemudian ditengarai sebagai penyebabnya adalah pandangan kritis masyarakat atas isu anggaran Covid-19 belum memiliki daya tekan publik yang kuat sehingga belum dapat memaksa Pemda untuk lebih akuntabel dan transparan atas isu tersebut.

Setali tiga uang dengan kesimpulan pertama di atas, hasil penelitian ini semakin memperkuat bukti bahwa gaya NPM dalam manajemen pemerintah yang sangat berbasis pada standar dan ukuran yang didasarkan pada manfaat ekonomi dan ukuran efektif-efisiensi kinerja pemerintah terlihat sudah sangat terinstitusionalisasi dalam laku Pemda se-Indonesia. Hal ini kemudian membuat Pemda hanya berfokus kepada aturan yang telah ditetapkan, yakni hanya menyediakan laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK-RI, karena hal ini memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Akhirnya, Pemda se-Indonesia belum memfokuskan dirinya untuk lebih akuntabel dan transparan dalam isu keuangan di *website* resminya.

Dari dua catatan utama tersebut, kebutuhan akan peningkatan literasi internet masyarakat juga tidak kalah penting untuk digalakkan. Sebab hal ini akan menghadirkan komunitas masyarakat yang memiliki pemahaman tentang pentingnya praktik akuntabilitas dan transparansi Pemda yang akan secara paralel tergambar melalui *website* resmi mereka. Pada akhirnya, peningkatan literasi internet masyarakat juga akan membantu hadirnya standar akuntabilitas dan transparansi berbasis *website* yang sesuai dengan konteks sosial-masyarakat di daerah. Akhirnya, penelitian ini kemudian diharapkan dapat memperkaya dan mengisi diskusi isu-isu akuntabilitas dan akuntansi dalam literatur kajian pemerintahan terkini di Indonesia. Sekaligus, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kajian-kajian baru dengan fokus studi pola akuntabilitas dan transparansi pemerintah di era internet dan sosial media dalam konteks Indonesia bahkan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). Politics of E-Government: E-Government and the Political Control of Bureaucracy. *Public Administration Review*, 71(3), 414–424. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02225.x>
- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2015). Factors determining online sustainability reporting by local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 79–109. <https://doi.org/10.1177/0020852314541564>
- Bell, J., Hoque, Z., Harun, H., Van Peurse, K., & Eggleton, I. (2012). Institutionalization of accrual accounting in the Indonesian public sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- BPK-RI. (2021). Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan. Retrieved January 30, 2022, from Siaran Pers website: <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan>
- Cahya, D. A. D., Tarigan, J. S. R., & Rivaldo, T. (2021). Urgensi Open Government Melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 33–57. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.503>
- CNBC. (2021). PPKM Diperpanjang, Jokowi Janji Penyaluran Bansos Dipercepat.
- CNN-Indonesia. (2021, Januari 11). BPK Ungkap Risiko Korupsi Dana APBN di Masa Pandemi Corona. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011112407-532-592071/bpk-ungkap-risiko-korupsi-dana-apbn-di-masa-pandemi-corona>.
- CNN Indonesia. (2019). 4 Area di Papua Masih Belum Bisa Akses Internet. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190910195136-192-429245/4-area-di-papua-masih-belum-bisa-akses-internet>.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>

- de Vries, M., & Nemec, J. (2013). Public sector reform: an overview of recent literature and research on NPM and alternative paths. *International Journal of Public Sector Management*, 26(1), 4–16. <https://doi.org/10.1108/09513551311293408>
- Deegan, C. (2017). Twenty five years of social and environmental accounting research within Critical Perspectives of Accounting: Hits, misses and ways forward. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 65–87. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.005>
- Diefenbach, T. (2009). New Public Management in Public Sector Organizations: the Dark Sides of Managerialistic “Enlightenment.” *Public Administration*, 87(4), 892–909. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x>
- Djamhuri, A. (2009). *A case study of governmental accounting and budgeting Reform at local authority in indonesia: an institutionalist perspective*. USM.
- Eltantawy, N., & Wiest, J. B. (2011). The Arab spring Social media in the Egyptian revolution: reconsidering resource mobilization theory. *International Journal of Communication*, 5, 18.
- Ezzamel, M. (1997). Accounting, Control and Accountability: Preliminary Evidence From Ancient Egypt. *Critical Perspectives on Accounting*, 8(6), 563–601. <https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0123>
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gallhofer, S., Haslam, J., & Yonekura, A. (2015). Accounting as differentiated universal for emancipatory praxis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 846–874. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2013-1451>
- Goldfinch, S., & Wallis, J. (2010). Two Myths Of Convergence In Public Management Reform. *Public Administration*, 88(4), 1099–1115. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01848.x>
- Google-Scholar. (2022). Cited by 108: Transparency of sustainability information in local governments: English-speaking and Nordic cross-country analysis Navarro Galera A., De Los Rios Berjillos A., Ruiz Lozano M., Tirado Valencia P. (2014) *Journal of Cleaner Production*, 64 , pp. Retrieved January 31, 2022, from [https://scholar.google.com/scholar?cites=1021776258897106659&as\\_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=en](https://scholar.google.com/scholar?cites=1021776258897106659&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=en)

- GRI. (2010). GRI Reporting in Government Agencies. In *Global Reporting Initiative*. Retrieved from Global Reporting Initiative website: <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-Reporting-in-Government-Agencies.pdf>
- GRI. (2016). *Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards* (2016th ed.). Amsterdam: Global Reporting Initiative.
- Hadi, S., Daeng, S., Afrimadona, Darmastuti, S., Pratiwi, E., & Nataprawira, I. (2012). *Kudeta Putih: Reformasi and Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2013.07.005>
- Harun, H., An, Y., & Kahar, A. (2013). Implementation and challenges of introducing NPM and accrual accounting in Indonesian local government. *Public Money and Management*, 33(5), 383–388. <https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131>
- Harun, H., & Robinson, P. (2010). The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector. In *Research in Accounting in Emerging Economies* (Vol. 10). [https://doi.org/10.1108/s1479-3563\(2010\)0000010014](https://doi.org/10.1108/s1479-3563(2010)0000010014)
- Hossain, D. M., Nik Ahmad, N. N., & Siraj, S. A. (2016). Marxist Feminist Perspective of Corporate Gender Disclosures. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 7, 11–24. <https://doi.org/10.17576/ajag-2016-07-02>
- ICMA. (2021). *Transparent Governance & Anti-Corruption*. ICMA. <https://icma.org/transparent-governance-anti-corruption>
- Indonesia corruption watch. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19*. <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19>
- Iqbal, M. (2021, Juli 28). Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4-264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui-dalam-korupsi-bansos>
- Jose, A., Lee, S., & Lee, S. (2017). Disclosures Environmental Reporting of Global

- Corporations : A Content Analysis based on Website Disclosures. *Journal of Business*, 72(4), 307–321. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9172-8>.
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Joseph, C., Pilcher, R., & Taplin, R. (2014). Malaysian local government internet sustainability reporting. *Pacific Accounting Review*, 26(1/2), 75–93. <https://doi.org/DOI 10.1108/PAR-07-2013-0071>
- Juliadi, R. (2017). The Construction of Buzzer Identity on Social Media. *Advances in Social Science*, 150(November 2017), 337–344. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icotic-17/25902416>.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>.
- Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2015). Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience. *Global Business Review*, 16(3), 351–363. <https://doi.org/10.1177/0972150915569923>.
- Krank, S., Wallbaum, H., & Grêt-Regamey, A. (2010). Constraints to implementation of sustainability indicator systems in five Asian cities. *Local Environment*, 15(8), 731–742. <https://doi.org/10.1080/13549839.2010.509386>.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran Dan Mitra. *Informasi*, 47(2), 149–166. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079>.
- Kurniawan, N. I., & Rye, S. A. (2014). Online Environmental Activism And Internet Use In The Indonesian Environmental Movement. *Information Development*, 30(3), 200–212. <https://doi.org/10.1177/0266666913485260>.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggresiveness: a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100.

<https://doi.org/10.1080/0969160x.2015.1093778>.

- Lapsley, I. (2009). New public management: The cruellest invention of the human spirit? *Abacus*, 45(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00275.x>.
- Lee, P. S. N., So, C. Y. K., & Leung, L. (2015). Social Media And Umbrella Movement: Insurgent Public Sphere In Formation. *Chinese Journal of Communication*, 8(4), 356–375. <https://doi.org/10.1080/17544750.2015.1088874>.
- Lorenz, C. (2012). If you're so smart, why are you under surveillance? Universities, neoliberalism, and new public management. *Critical Inquiry*, 38(3), 599–629. <https://doi.org/10.1086/664553>.
- Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., & Pearce, I. (2011). The Arab Spring | the revolutions were tweeted: Information flows during the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions. *International Journal of Communication*, 5, 31.
- Masinambow, B. W. L., & Gosal, P. H. (2021). Tantangan dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi di Tengah Pandemi Covid-19. *Media Matrasain*, 17(1), 9–14.
- Mir, M. Z., Chatterjee, B., & Taplin, R. (2015). Political competition and environmental reporting Evidence from New Zealand local governments. *Asian Review of Accounting*, 23(1), 17–38. <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2014-0027>.
- Navarro Galera, A., De Los Ríos Berjillos, A., Ruiz Lozano, M., & Tirado Valencia, P. (2014). Transparency of sustainability information in local governments: English-speaking and Nordic cross-country analysis. *Journal of Cleaner Production*, 64, 495–504. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.038>.
- Niemann, L., & Hoppe, T. (2018). Sustainability reporting by local governments: a magic tool? Lessons on use and usefulness from European pioneers. *Public Management Review*, 20(1), 201–223. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1293149>.
- Parker, L. D. (2009). Photo-elicitation: An ethno-historical accounting and management research prospect. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 22(7), 1111–1129. <https://doi.org/10.1108/09513570910987439>.
- Perez-Lopez, G., Prior, D., & Zafra-Gómez, J. L. (2015). Rethinking New Public Management Delivery Forms and Efficiency: Long-Term Effects in Spanish Local Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(4), 1157–

1183. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu088>.

- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is E-Government Leading To More Accountable and Transparent Local Governments? an Overall View. *Financial Accountability & Management*, 26(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x>.
- Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions In Implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 29(1), 104–137.
- Qian, W., Burritt, R., & Monroe, G. (2011). Environmental management accounting in local government. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(1), 93–128. <https://doi.org/10.1108/0951357111098072>.
- R. William Liddle. (2013). Improving the Quality of Democracy in Indonesia: Toward a Theory of Action. *Indonesia*, (96), 59. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0057>.
- Rajiani, I. (2011). A cultural ecology of new public management in Indonesia. *Journal of Administrative Science*, 8(1), 17–31.
- Ramanna, K. (2013). A framework for research on corporate accountability reporting. *Accounting Horizons*, 27(2), 409–432.
- Rusiadi, Aprilia, A., Adianri, V., & Verawati. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–182.
- Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. In *International Journal*. Retrieved from [https://books.google.com/books/about/The\\_Coding\\_Manual\\_for\\_Qualitative\\_Research.html?id=V3tTG4jvgFkC](https://books.google.com/books/about/The_Coding_Manual_for_Qualitative_Research.html?id=V3tTG4jvgFkC).
- Saputra, R. O. (2021). PENGATURAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 188–195.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022). Data Covid-19 Indonesia. Retrieved January 30, 2022, from Information website: <https://covid19.go.id/>
- Scopus. (2022). 62 documents have cited: Transparency of sustainability information in local governments: English-speaking and Nordic cross-country analysis Navarro Galera A., De Los Rios Berjillos A., Ruiz Lozano M., Tirado Valencia P. (2014) *Journal of Cleaner Producti*. Retrieved January 30, 2022, from



<https://www.scopus.com/results/citedbyresults.uri?sort=plf-f&cite=2-s2.o-84890311145&src=s&imp=t&sid=fd93ce1fd064e64647394bc977c605aa&sot=cite&sdt=a&sl=0&origin=inward&editSaveSearch=&txGid=af4cca297aa2ee5dfc4904d23b2346fa>

Shahib, H. M. (2021). *Towards the Local Government's Integrated Accountability Framework: A Critical Lesson from Socio-Environmental Issues in Indonesia*.

<https://doi.org/10.1007/978-981-33-6617-6>

Shahib, H. M., & Risky, F. R. (2017). Accountability in the Internet Era: A Lesson from Local Governments in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 1(1), 57–74.

Shahib, H. M., Sukoharsono, E. G., Achsin, M., & Prihatiningtias, Y. W. (2020a). Assessing Government's Social-Environmental Accountability in Industrial Revolution 4.0 Era: A Review of Indonesian Setting. *Proceedings of the 1st Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2019)*, 136(Ambec 2019), 99–105. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.020>

Shahib, H. M., Sukoharsono, E. G., Achsin, M., & Prihatiningtias, Y. W. (2020b). Developing Local Government's Socioenvironmental Accountability: Insights from Indonesian Socioenvironmental NGOs' Annual Reports. In K. C. Yekini, L. S. Yekini, & P. Ohalehi (Eds.), *Environmentalism and NGO Accountability (Advances in Environmental Accounting & Management)*pp. 27-54 (Vol. 9, pp. 27–54). <https://doi.org/10.1108/S1479-359820200000009003>

Situmorang, J. R. (2012). Pemanfaatan internet sebagai new media dalam bidang politik, bisnis, pendidikan dan sosial budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418.%25p>.

Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah COVID-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206.

Syaipudin, L. (2020). Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19. *Kalijaga*, 2(1), 14–34.

Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan di indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*,

3, 457–479.

Transparency International. (2015). Corruption Perception Index. Retrieved from  
<http://www.transparency.org/cpi2015>

Whyte, D., & Wiegratz, J. (2016). *Neoliberalism and the Moral Economy of Fraud* (Vol. 211). Routledge.